

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDEDESAAN

(Study kasus: 5 Desa Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Papua).

Kelabur Yikwa¹, Amran T Naukoko², Steeva Y. L Tumangkeng³

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: : Kelaburyikwa75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Papua. Dalam memperjelas permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini, maka penulis mempergunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan survei langsung melalui wawancara dengan 10 orang responden disetiap desa yang menjadi sampel sesuai dengan kebutuhan analisis terkait dengan objek penelitian data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan tabel-tabel hasil analisis data. Hasil penelitian Partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan 5 Desa, dimana dalam proses Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat 5 Desa kepada masyarakat lima desa distrik bokondini Desa Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan.

Kata Kunci : *Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar baik provinsi, kabupaten, maupun desa. Salah satu dari pelayanan tersebut adalah pemerintah bertanggungjawab dalam meningkatkan pembangunan desa dengan memberikan dana yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah mengapresiasi dana bantuan kepada desa dalam bentuk Dana Desa (DD) yang berasal dari dana APBN sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari dana APBD dengan fokus utamanya yaitu operasional desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah mengeluarkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk membiayai program pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian dana infrastruktur pembangunan bagi perdesaan.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Itulah sebabnya penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana partisipasi masyarakat pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian Kecamatan bokondini Kabupaten Tolikara Papua.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pembangunan

Problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara idela dan bagaimana cara merealisasikannya. Penelusuran formula ideal dan strategi perubahan masyarakat ini dapat disebut sebagai pembangunan. Beban sini secara

formal diamanatkan kepada negara melalui pemerintah yang ada didalamnya, sehingga dalam kurun masa tertentu, pemerintah suatu negara bertugas melakukan pembangunan pada seluruh warga negara tersebut menuju kondisi yang lebih baik.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identic dengan istilah *development modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europianization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *term political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretabel, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti. Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langka untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah Kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menjediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan – bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi – fungsi sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari – hari masyarakat. Pada dasarnya penyediaan infrastruktur dilaksanakan oleh masing – masing individu, sama halnya dengan pemenuhan kebutuhan – kebutuhan dasar lainnya seperti sadang dan pangan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional, merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain :

1. Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin.
2. Pembangunan menjadi lebih murah karena masyarakat juga menanggung sebagian

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pada Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi keikutsertaannya terlibat dalam program yang ditawarkan pemerintah yaitu pada masyarakat, *Ali Nurdin (2000)* partisipasi bergantung pada kondisi ekonomi, sosial budaya dan keberadaan lingkungan dari masyarakat yang terlibat serta tingkat pendidikan masyarakat. Bahwa sosial yang dapat digunakan para perencana untuk dapat mengetahui bagaimana masyarakat terlibat dalam pembangunan adalah faktor geografis, organisasi dan budaya lokal, ekonomi masyarakat serta sosial politik yang berkembang. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infastruktur desa dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Ekonomi

Pada tingkat lokal, karakteristik wilayah perdesaan yang ditinjau dari aspek ekonomi dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan mayoritas pekerjaan penduduknya. Seperti pengklasifikasian desa yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian pemberdayaan daerah tertinggal yang membaginya menjadi dua, yaitu desa tertinggal dan desa tidak tertinggal. Karakteristik suatu desa yang dapat digolongkan menjadi desa tertinggal salah satu kriterianya berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengklasifikasian desa menurut Departemen Dalam Negeri yaitu berdasarkan tipologi desa atau karakteristik mayoritas pekerjaan penduduknya, seperti desa nelayan, desa perkebunan, desa perladangan, desa persawahan, desa industri dan lain sebagainya. Karakteristik desa ditinjau dari aspek ekonomi kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan penduduk dan mayoritas pekerjaan penduduknya.

b. Aspek Sosial Budaya

Perbedaan karakteristik suatu wilayah secara mudah dapat diidentifikasi dari sosial budaya yang berkembang pada masyarakat setempat. Bahkan pembagian teritorial suatu wilayah banyak disebabkan oleh sosial budaya yang berkembang pada masyarakat yang mendiaminya, karena aspek sosial budaya merupakan arena yang sangat luas untuk difahami kaitannya dengan hubungan antara partisipasi masyarakat dengan karakteristik sosial budaya masyarakat lokal yang ada. Untuk itu dalam penelitian ini, variabel sosial budaya yang dibahas lebih menekankan pada variabel-variabel yang pernah diteliti sebelumnya kaitannya dengan keberadaan partisipasi masyarakat. Paham dari ilmu sosial kemasyarakatan mengungkapkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan hidup dengan memerlukan bantuan dari orang lain.

c. Aspek Geografi Wilayah

Aspek geografis suatu desa yang dipertimbangkan dalam hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat pada penelitian ini meliputi jarak desa dengan pusat kota, aksesibilitas ekstra dan intra serta sumberdaya alam yang dimilikinya. Pada kasus dimana letak geografis wilayah suatu desa jauh dari kota maka keadaan yang biasa dijumpai minimnya perhatian dalam pembangunan. Keberadaan geografis desa yang didalamnya menyangkut sumberdaya alam yang dimiliki, telah menjadikan suatu wilayah memiliki potensi yang lebih kompetitif dibandingkan dengan wilayah lainnya secara ekonomi. Dalam suatu keadaan ideal dimana keberadaan sumberdaya alam khususnya barang tambang golongan C dalam satu desa dimanfaatkan dengan baik maka keberadaan prasarana transportasi pada desa tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan desa lainnya yang tidak memilikinya. Dikaitkan dengan konteks partisipasi maka anggapan yang muncul adalah keberadaan penambangan pasir dan batu (galian C) yang merupakan bahan dasar pembuatan jalan akan berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat khususnya dalam berkontribusi untuk menyumbang bahan konstruksi.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 5 (Lima), Desa Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara. Pemilihan wilayah pengamanan ditentukan model purposive dan pemilihan didasari oleh asas generalisasi dimana Desa-desa yang terpilih merupakan perwakilan dari desa-desa yang tidak terpilih namun diasumsikan memiliki karakteristik yang sama.

Jenis dan Sumber Data

Dalam memperjelas permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini, maka penulis mempergunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan survei langsung melalui wawancara dengan 10 orang responden disetiap desa yang menjadi sampel sesuai dengan kebutuhan analisis terkait dengan objek penelitian data.

Data sekunder yaitu data yang bersumber atau diperoleh dari kantor-kantor atau instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan masalah dan judul penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung ke sumber data yakni instansi terkait untuk mendapatkan data diperlukan. Metode wawancara dan pengamatan (observasi) serta menggunakan daftar pertanyaan. Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan tabel-tabel hasil analisis data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

Partisipasi Masyarakat

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah Distrik Bokondini dan masyarakat 5 (lima) Desa yang berjumlah sebanyak 50 orang.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan responden, dimana peneliti melakukan wawancara langsung disetiap rumah responden, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 orang responden. Deskripsi responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Ringkasan dari deskripsi responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 1
Responden Berdasarkan Jenis Kelami

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	35
2	Perempuan	15
Total		50

Sumber: Data
ta

Diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 35 orang sedangkan sisanya sebanyak 15 orang adalah responden perempuan.

Tabel: 2
Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah (Orang)
1	<30 Tahun	-
2	30-40 Tahun	15
3	41-50 Tahun	15
4	>50 Tahun	20
Total		50

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Usia, di Desa Penelitian antara lain berusia diatas 50 tahun sebanyak 20 orang responden kemudian responden dengan usia 41 - 50 tahun sebanyak 15 orang sedangkan sisanya usia 30 – 40 tahun sebanyak 15 orang responden.

Tabel: 3
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak Sekolah	15
2	SD	5
3	SMP	10
4	SMA/SMK	7
5	Diploma	5
6	S1	8

Total	50
--------------	-----------

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tingkat pendidikannya, yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 7 orang, kemudian yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 8 orang kemudian sebanyak 10 orang adalah responden dengan tingkat pendidikan SMP, kemudian yang memiliki tingkan pendidikan Diploma sebanyak 5 orang responden dan sebanyak 5 orang responden adalah tingkat pendidika SD, dan sebanyak 15 orang responden tidak memiliki tingkat pendidikan.

Tabel : 4
Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

No	Tingkat Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	40
2	PNS	8
3	Swasta	7
Total		50

Sumber: Data Diolah, 2018

Dari tabel diatas menunjukan bahwa tingkat pekerjaan, yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini adalah: Petani sebanyak 35 orang responden sedangkan PNS sebanyak 8 orang responden dan Swasta sebanyak 7 orang responden.

Tingkat Kepercayaan

Berikut ini adalah tingkat kepercayaan, Masyarakat kepada lima kepala Desa mampu membawa masyarakat Lima desa, ke arah yang baik dalam melaksanakan pegelolaan alaokasi dana Desa dalam menunjang pembagunan pedesaan di Distrik bokondini Kabupaten tolikara Papua.

Tabel: 5
Masyarakat percaya dengan hasil kerja yang di lakukan oleh kepala Desa

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	20
2	Tidak	30
Total		50

Sumber :Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa, masyarakat percaya dengan hasil kerja yang dilakukan oleh kepala Desa adalah 20, orang responden, dan yang tidak percaya hasil kerja yang di lakukan Kepala Desa adalah 30 orang responden.

Tabel: 6**Masyarakat percaya setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepala Desa ada Evaluasi**

No.	KepercPayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	15
2	Tidak	35
Total		50

Sumber: Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa, masyarakat percaya setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa ada evaluasi kerja dalah 15 orang responden dan yang tidak percaya setiap kegiatan yang di lakukan ada Evaluasi adalah 35 orang responden.

Tabel: 7**Masyarakat percaya Kepala Desa Terbuka Dalam Pegelolaan Dana Desa.**

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1.	Percaya	13
2.	Tidak	37
Total		50

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel diatas menunjukan bahwa masyarakat yang percaya Kepala desa dalam pegelolaan Dana Desa, adalah 13 orang responden dan yang tidak percaya dalam pegelolaan Dana Desa secara terbuka adalah 37 orang responden.

Tabel: 8**Masyarakat Percaya Kepala Desa Dialong Secara Rutin**

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	13
2	Tidak	37
Total		50

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Masyarakat percaya kepala Desa, melakukan dialog secara rutin dalam kegiatan di Desa adalah 13 orang responden, dan yang tidak percaya dalam Dialong secara rutin adalah 37 orang responden.

Tabel: 9
Masyarakat Menyampaikan aspirasinya pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	40
2	Tidak	10
Total		50

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel diatas Masyarakat menyampaikan aspirasinya pada setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa adalah 40, orang responden, dan yang tidak memberikan adalah 10 orang responden.

Tabel: 10
Masyarakat pedulih dengan kegiatan pemerintah yang ada di desa.

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	29
2	Tidak	21
Total		50

Sumber: Diolah 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, masyarakat pedulih dengan kegiatan pemerintahan yang ada di Desa adalah 29 orang responden, dan yang tidak peduli dalam kegiatan Pemerintahan Desa adalah 21 orang responden

Tabel:11
Masyarakat dengan sukarelah memberikan dukungan pada setiap kegiatan di desa

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	20
2	Tidak	30
Total		50

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel diatas menunjukan bahwa masyarakat dengan sukarela memberikan dukungan pada setiap kegiatan pemerintah yang ada di Desa adalah 20 orang responden, dan yang tidak memberikan dukungan adalah 30 rong responden.

Tabel: 12
Tidak ada paksaan masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pegelolaan Dana untuk pembangunan di desa.

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	20
2	Tidak	30
Total		50

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel diatas Menunjukan bahwa Masyarakat tidak ada paksaan pada masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pegelolaan Dana untuk pembangunan di Desa yang aktif adalah 30 orang responden dan yang tidak aktif dalam kegiatan pegelolaan Dana Desa adalah 20 orang responden.

Tabel : 13
Masyarakat mulai mengembangkan diri dalam partisipasi pada pegelolaan.

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	15
2	Tidak	35
Total		50

Sumber: Diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa masyarakat mulai mengembangkan diri dalam partisipasi pada pengelolaan alokasi dana di Desa yang mengembagkan diri adalah 35 orang responden dan yang tidak pengembangkan diri adalah 15 orang responden.

Tabel: 14
Masyarakat mencari informasi baru megenai kondisi pengelolaan alokasi Dana Desanya

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	13
2	Tidak	37
Total		50

Sumber: Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas masyarakat mencari informasi terbaru mengenai kondisi pengelolaan alokasi dana di desanya yang mencari informasi adala: 30 orang responden dan yang tidak mencari informasi tentang dana Desa adalah 20 orang responden.

Tabel: 15
Masyarakat komitmen untuk memajukan proses pengelolaan dalam pembangunan yang ada di desa.

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	20
2	Tidak	30
Total		50

Sumber: Diolah 2018

Dari tabel diatas masyarakat berkomitmen untuk memajukan proses pengelolaan dalam pembangunan yang ada di Desa yang ingin memajukan adalah: 20 orang responden dan yang tidak ingin memajukan adalah 30 orang responden.

Tabel:16
Masyarakat percaya kepala Desa mampu bertanggungjawab pada kerja yang dilakukan.

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	15
2	Tidak	35
Total		50

Sumber:Diolah 2018.

Dari Tabel diatas menunjukan bahwa masyarakat percaya kepala Desa mampu bertanggung jawab pada kerja yang dilakukan yang percaya adalah: 15 orang responden dan yang tidak percaya dalam Pertanggungjawab oleh kepala Desa adalah 35 orang responden.

Tabel: 17
Masyarakat Percaya kepala Desa tidak akan melakukan penyelewengan kekuasaan sebagai kepala desa.

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	20
2	Tidak	30
Total		50

Sumber: Diolah 2018

Dari tabel diatas menunjukan bahwa masyarakat percaya kepala desa tidak akan melakukan penyelewengan kekuasaannya sebagai kepala Desa yang percaya adalah 20:

orang responden dan tidak percaya dalam penyelewengan Keuangan Desa adalah 30 orang responden.

Tabel: 18
Masyarakat percaya bahwa kepala desa mampu membawa desa ke arah yang lebih maju.

No.	Kepercayaan	Jumlah Orag
1	Percaya	23
2	Tidak	27
Total		50

Sumber: Diolah 2018

Dari tabel diatas menunjukan bahwa, masyarakat percaya bahwa kepala desa mampu membawa desa ke arah yang lebih maju, yang percaya adalah: 24 orang responden dan yang tidak percaya desa bahwa Kepala Desa membawa desa ke arah yang baik adalah 26 orang responden.

Tabel: 19
Masyarakat aktif dalam kegiatan pemilihan kepala Desa.

No.	Kepercayaan	Jumlah Orang
1	Percaya	43
2	Tidak	7
Total		50

Sumber: Diolah 2018

Dari tabel diatas menunjukan bahwa masyarakat aktif dalam kegiatan pemilihan kepala desa yang aktif adalah: 43 orang responden dan, yang tidak aktif dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa adalah 7 orang responden.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan perdesaan di 5 Desa Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Papua, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- Partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa APBD dalam menunjang pembangunan perdesaan di 5 Desa Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara Papua, dimana dalam proses Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan ada tiga tahap yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari Musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan

musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat 5 Desa kepada masyarakat lima desa distrik bokondini Desa . Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Distrik bokondini masih kurang efektif.

Faktor-faktor penghambat Partisipasi masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembagunan Pedesaan di 5 Desa Distrik Bokondini yaitu :

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM).
- 2) Informasi.
- 3) Partisipasi Masyarakat.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai Pemerintah 5 Desa adaistrik Bokondini Kabupaten Tolikara Papua, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat 5 Desa kepada masyarakat. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah 5 Desa sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sebagai Pemerintah Lima Desa Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Desa. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

<http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/konsep-pembangunan-desa.htm>

*Holil Soelaiman. (1980). Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.*Penerbit Bandung.

Ali Nurdin. (2000). Identifikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam Pemeliharaan Prasarana Paca Program P3DT, Tasikmalaya..

Panouw Diane. (2003). Analisis Pembangunan Desa Wilayah. Tesis pasca sarjana unstrat manado.

B.S. Muljana, (1996) Perencanaan Pembagunan Nasional, UIP Direktur CPIS.Jakarta.

M Yusuf, (2010) Pengelolaan aset daerah menuju pegelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Jln raya lenteng agung No.101. penerbit Salemba Empat Jagakarsa Jakarta Selatan.

Permen Kemendesa Nomor 19 (Tahun 2017) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa). ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.

TOLIKARA (PT) – Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa).

Menurut Peraturan Pemerintah (RI Nomor 72 Tahun 2005) tentang Desa